

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA ALAM

Studi Kasus di Pantai Oetune, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Yudha Eka Nugraha¹, Elisabet Rambu Lika Enga²

¹Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia, yudhaekanugraha@gmail.com

²Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia, elisabetlika06@gmail.com

ABSTRAK

Histori Artikel

Submitted:
20 Desember 2020
Reviewed:
9 Januari 2021
Accepted:
25 Januari 2021
Published:
15 Mei 2021

Tujuan yang hendak dicapai penelitian ini yaitu untuk mengetahui peranan pemerintah dalam mengelola daya tarik wisata Pantai Oetune di Desa Tuafanu. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur mengenai Pantai Oetune dari berbagai sumber tersedia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa peran pemerintah daerah (dinas pariwisata TTS) dalam pengelolaan daya tarik wisata Pantai Oetune berjalan melalui 4 peran yakni peran koordinator, merencanakan strategi dan kebijakan pengelolaan pantai oetune dalam membuat infrastruktur seperti akses masuk jalan ke daya tarik wisata, penyediaan listrik, dan air bersih di wilayah pantai oetune. Peran fasilitator yakni dengan menyediakan sarana dan prasarana di DTW Pantai Oetune, melakukan promosi wisata dan memandu setiap kecamatan untuk mengidentifikasi daya tarik wisata setiap wilayah. Peran stimulator dilakukan melalui pelibatan masyarakat lokal sebagai pengelola pantai. Peran motivator berjalan melalui program pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan lahan untuk membuka usaha di daya tarik wisata Pantai Oetune tanpa memungut biaya bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan, Pantai Oetune

THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENT IN MANAGING NATURAL TOURISM ATTRACTIVE

Case Study of Oetune Beach, in Timor Tengah Selatan Regency

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the government role in the management of Oetune Beach in Tuafanu Village. The research used a qualitative descriptive approach and data were obtained from field observations, interviews, documentation, and literature studies on Oetune Beach from various available sources. Based on the results of the research, it was found that the role of the local government (TTS tourism office) in managing the tourist attraction of Oetune Beach which runs through 4 roles, namely the role of coordinator, developing strategies and policies for managing Oetune Beach in making infrastructure such as access roads to tourist attractions, provision of electricity, and clean water in the oetune beach area. The role of the facilitator is by providing facilities and infrastructure at the Oetune Beach, conducting tourism promotions and guiding each sub-district to identify tourist attractions in each region. The role of the stimulator is carried out through the involvement of local communities as coastal managers. The role of a motivator is carried out through a community empowerment program that provides land to open the tourist attraction of Oetune Beach at no cost to local communities.

Keywords: Government Role, Management, Oetune Beach



PENDAHULUAN

Wisata alam di Indonesia kerap kali mendapatkan perhatian pemerintah karena merupakan salah satu objek yang dapat dikembangkan untuk kepariwisataan. Dalam lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah daya tarik wisata alam sendiri berjumlah 115 dari 458 daya tarik wisata di NTT atau 25.11% dan 22.71% diantaranya adalah wisata alam pantai (Database Kepariwisataan NTT, 2017). Bentuk kegiatan wisata alam berarti bahwa potensi alam dimanfaatkan sebagai atraksi utama dalam pariwisata (Utami, 2016). Selain pantai, bentuk wisata alam dapat berupa gunung, pemandangan alam, wisata bahari, atau wisata tirta. Wisata alam harus dijaga keberlanjutannya salah satunya melalui pendekatan *environmental planning approach* yang menekankan pada konservasi lingkungan (Marpaung, 2002). Penekanan ini tetap terbuka bagi wisatawan yang harus diperhatikan kebutuhan dalam melakukan aktivitas kepariwisataannya. Baik penekanan konservasi lingkungan, pemenuhan kebutuhan wisatawan, dan pengelolaan pariwisata tercantum dalam UU No 32 pasal 1 tahun 2009 mengenai upaya sistematis yang terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan terpadu sehingga pengelolaan berjalan dengan baik. Pengelolaan yang baik merupakan tanggung jawab berbagai pihak salah satunya adalah pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan pada wilayah tempat wisata alam tersebut berada. Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola kawasan wisata memiliki peran krusial dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Pengembangan pariwisata terkait dengan siklus hidup kepariwisataan. Studi mengenai siklus hidup destinasi pariwisata telah dilakukan oleh Putra dan Hitchcock (2006) mengenai siklus hidup pariwisata di Bali dan Widaningrum, dkk. (2018) dimana dalam studi tersebut Putra memaparkan mengenai efek terorisme terhadap siklus hidup pariwisata di Bali dan peran stakeholders dalam mempertahankan dan

mengembangkan kepariwisataan agar tetap berkelanjutan. Peran stakeholder dalam pengembangan pariwisata sesuai dengan unsur pentahelix menurut (Aribowo, 2018) adalah kolaborasi antara akademisi, bisnis, komunitas, media massa, dan pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder yang penting dalam siklus hidup kepariwisataan berperan pada lini pembuat kebijakan dan pengelolaan destinasi pariwisata. Destinasi pariwisata yang dikelola dengan profesional oleh masyarakat setempat tentu akan memberikan sumbangan bagi daerah, serta memicu pertumbuhan ekonomi kawasan disekitar destinasi wisata. Otonomi daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sama halnya dengan siklus hidup destinasi pariwisata, perencanaan awal pengembangan dimulai dengan pengenalan kawasan yang akan dikembangkan. Identifikasi awal ini ditujukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar kesejahteraan yang digapai akan dirasakan dengan optimal. Selain itu, dari perencanaan akan dapat digali kompetensi-kompetensi apa saja yang dibutuhkan masyarakat setempat agar siap membantu pemerintah dalam mengelola sebuah destinasi wisata dengan kompetensi teknis, operasional, dan manajerial yang dibutuhkan sebagai dasar jasa pariwisata. Berkaitan dengan hubungan stakeholder pemerintah dan masyarakat setempat, salah satu bentuk wisata alam yang sedang naik citra positifnya yakni Pantai Oetune di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini terkenal memiliki potensi dan daya tarik wisata yang unik dan menarik. Walaupun demikian, pengembangan pariwisata di Kabupaten TTS masih belum optimal. Pengelolaan masih belum dapat dilaksanakan dengan sinergis. Stakeholder dalam pentahelix pariwisata belum semua terlibat sehingga pengembangan belum menuju puncaknya. Satu-satunya lembaga yang lebih

banyak melakukan pengelolaan destinasi adalah Pemerintah Kabupaten TTS yakni Dinas Pariwisata Kabupaten TTS yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengembangan daya tarik wisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Data yang diperoleh dari website Dinas Pariwisata Kabupaten TTS menunjukkan bahwa data tarik wisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan terbagi menjadi beberapa klasifikasi yakni: Wisata Alam berjumlah 45% dan Wisata Budaya berjumlah 55%.

Pantai Oetune terletak di Desa Tuafanu, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) Secara geografis Pantai Oetune terletak pada titik koordinat 10.0204° Lintang Selatan dan 124.5385° Bujur Timur. Topografi didominasi oleh dataran aluvial datar sampai berkemiringan landai. Desa Tuafanu memiliki ketinggian 13 m dari permukaan laut. Sedangkan tekstur tanahnya berupa tanah berpasir. Berdasarkan hidrologi, maka sumber air berasal dari air hujan, air tanah dan air permukaan. Suhu di lokasi berkisar antara 27°C - 29°C. Kelembaban udara 85,5% per tahun, dan kecepatan angin rata-rata 12 - 20 knots.

Sebagian kawasan ini dikelilingi oleh pegunungan namun, atraksi utamanya adalah pantai. Keadaan geografi dan topografi yang berbeda memberikan keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Pasir pantai oetune seperti padang pasir namun berada di dekat laut. Pantai ini memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata karena memiliki keunikan padang pasir di kawasan pantai berwarna coklat, pohon cemara, dan ketapang yang tumbuh di pantai tersebut. Daya tarik wisata Pantai Oetune merupakan asset wisata yang memiliki nilai jual dan akan sangat bermanfaat apabila dikelola sebaik mungkin. Fasilitas dan sarana prasarana yang ada di daya tarik wisata pantai Oetune berupa lahan kios untuk berjualan, toilet, villa, *gallery souvenir*, rumah pasar, *prayer service*, menara pantau pantai dan lopo atau tempat beristirahat berupa rumah khas warga Pulau Timor. Akses jalan menuju daya tarik

wisata Pantai Oetune dapat ditempuh dengan kendaraan umum sekitar 115 km atau 2,5 jam perjalanan dari pusat kota Kupang. Pengunjung akan dikenakan tarif masuk sebesar 3.000 rupiah dan 1.000 rupiah untuk kendaraan bermotor. Pantai ini kerap kali dikunjungi wisatawan domestik asal Kota Soe, Kupang dan Kabupaten Kota sekitar Pulau Timor. Kecenderungan jumlah kunjungan setiap tahunnya mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Kunjungan pada lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan terutama jumlah wisatawan domestik. Pada tahun 2015 jumlah total wisatawan domestik dan asing yang berkunjung ke Pantai Oetune berjumlah 46.659, pada tahun 2018 jumlah kunjungan kembali meningkat sampai 59.579, dan terbaru pada tahun 2019 jumlah kunjungan hampir menyentuh 62.000 orang (Dinas Pariwisata TTS, 2020)

Seluruh pengelolaan Pantai Oetune dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS. Selama penelitian ini dilaksanakan, wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata dilaporkan stabil. Namun, dilihat dari kondisi sarana prasarana yang kurang terawat seperti fasilitas listrik dan air bersih yang tidak selalu tersedia, toilet umum yang kotor, minimnya tempat sampah di daya tarik wisata serta minimnya jumlah lahan berjualan makanan untuk pengunjung. Hal ini kadang menjadi keluhan wisatawan yang berkunjung. Masyarakat setempat juga ingin berpartisipasi lebih pada kegiatan pariwisata dengan menyediakan jasa makanan minuman hanya terkendala dengan permodalan dan minimnya kreatifitas wirausaha masyarakat. Kondisi lain yang amat disayangkan yaitu akses jalan pada saat memasuki objek wisata Pantai Oetune yang perlu diperbaiki pada beberapa titik, karena kondisi jalan licin pada saat musim hujan sehingga membahayakan kendaraan wisatawan menuju Daya Tarik wisata. Pengelolaan Objek wisata perlu dilakukan untuk menciptakan daya tarik wisata yang diminati para wisatawan sehingga akan berdampak baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,

Sunarjaya, (2019). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan upaya-upaya pemerintah dalam mengelola daya tarik wisata Pantai Oetune yang sedang berkembang melalui peran pemerintah dalam pengelolaan destinasi wisata alam salah satu atraksi wisata yang sedang digemari di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

LITERATUR REVIEW

Peranan Pemerintah Dalam Bidang Kepariwisata

Sebagai salah satu bentuk industri yang berbasis pelayanan dan jasa, kepariwisataan tidak akan pernah lepas dari peranan pihakberwenang yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab paling tidak atas empat hal yakni: perencanaan daerah, pembangunan fasilitas utama dan pendukung pariwisata, mengeluarkan kebijakan pariwisata, serta pembuatan dan penegakan peraturan (Subadra, 2007). Berikut adalah penjelasan sekilas mengenai peran tersebut:

(1) Perencanaan Pariwisata: bagian ini mencakup perencanaan ekonomi yang memiliki tujuan memacu pertumbuhan industri yang terkait dengan pariwisata, perencanaan menggunakan lahan, perencanaan infrastruktur seperti bandara, jalan, air, listrik, penanggulangan sampah, dan pendukung lainnya, perencanaan sosial, penyediaan lapangan kerja dan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, keamanan internal untuk wisatawan.

(2) Pembangunan Pariwisata: bagian ini dilakukan oleh investor dari pihak swasta dalam membangun fasilitas dan jasa. Pemerintah menjamin agar pengawas para investor yang menanamkan modal di bidang pariwisata dapat bekerjasama dalam proyek pengadaan berskala besar seperti penyediaan air bersih, proyek limbah, pembangunan bandara dan transportasi darat.

(3) Kebijakan Pariwisata: peran sebagai pembuat kebijakan terkait dengan tujuan pembangunan pariwisata. Selain itu langkah prosedur pencapaian tujuan dikonversi dalam hukum dan dokumen-dokumen resmi. Kebijakan dalam bidang pariwisata dibuat

untuk peningkatan lapangan kerja, hubungan politik yang baik di luar dan dalam negeri serta yang terutama adalah pertumbuhan ekonomi. Umumnya kebijakan pariwisata dimasukkan ke dalam kebijakan ekonomi secara keseluruhan yang kebijakannya mencakup struktur dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

(4) Peraturan Pariwisata: berperan dalam melindungi wisatawan terkait dengan pelayanan biro perjalanan wisata, peraturan keamanan jumlah minimal lampu di hotel dan alat keselamatan selama berwisata, keamanan kesehatan dan standar kesehatan makanan yang disuguhkan untuk wisatawan, standar kompetensi pekerja dengan keahlian khusus seperti pilot, sopir dan nahkoda.

Teori lain mengenai peran pemerintah juga dipaparkan oleh Blakely, dalam Mudrajad Kuncoro (2004, 113-114) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata pada kawasan wisata sebagai:

(1) Koordinator: peran pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan atau strategi bagi pembangunan daerah wisata dengan merangkul semua komponen masyarakat sebagai actor utama dalam aksi pembangunan tersebut. Peran pemerintah sebagai coordinator mewadahi asosiasi di bidang pariwisata baik dalam tingkat lokal, regional, maupun internasional. Koordinasi juga berarti bahwa pemerintah berwenang membuat system koordinasi antara setiap sektor yang saling berkaitan dalam industri pariwisata.

(2) Fasilitator: peran pemerintah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangunan yang terdiri dari berbagai kalangan. Sebagai fasilitator, pemerintah melakukan pendampingan, pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan dalam pendanaan dan permodalan kepada masyarakat lokal yang diberdayakan.

(3) Stimulator: peran pemerintah sebagai stimulator yakni menciptakan strategi untuk membangun daya tarik wisata. Pemerintah menyusun strategi yang diimplementasikan dalam rangka mengembangkan daya tarik wisata. Artinya pemerintah memberikan

stimulus seperti contoh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat menyediakan kantin sehingga keuntungan yang didapatkan bisa dirasakan baik pemerintah daerah, masyarakat, dan wisatawan.

(4) Motivator: peran pemerintah sebagai motivator diperlukan untuk memotivasi usaha pariwisata terus berjalan. Baik investor, masyarakat lokal, pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang harus dimotivasi agar perkembangan pariwisata tetap berjalan dengan baik. Contoh seperti pemberian lahan usaha tanpa memungut biaya untuk masyarakat dan meningkatkan promosi pariwisata.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif kualitatif (Miller dalam Moleong, 2004:3). Penelitian ini lebih banyak dilakukan melalui pengamatan peneliti terhadap sebuah kawasan dan pengelola pada Pantai Oetune. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan informan (Nugraha, 2020). Informan kunci dalam penelitian ini berjumlah 11 orang dengan menggunakan metode *purposive sampling* yakni: kepala dinas pariwisata kabupaten TTS, Kepala Desa Tuafanu, 1 orang pengelola objek wisata pantai Oetune, 4 orang masyarakat atau pedagang di sekitar objek wisata, 4 orang pengunjung objek wisata pantai Oetune, 1 orang tokoh masyarakat. Sementara data sekunder didapatkan dari studi literature, buku catatan, dan laporan-laporan yang diperbolehkan untuk dianalisis oleh pemerintah daerah TTS. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian lapangan melalui observasi langsung ke pantai oetune dan kantor pemerintah daerah setempat, wawancara 11 informan kunci, studi pustaka, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daya Tarik Wisata Pantai Oetune

Asal mula nama Oetune berasal dari Bahasa Timor yang terdiri dari 2 suku kata yaitu Oe yang berarti air dan Tune berarti pohon *gewang*. Sehingga arti dari Oetune adalah air yang keluar dari pohon *gewang* dan menjadi sumber mata air untuk kelangsungan hidup masyarakat. Saat ini sumber mata air masih ada tetapi digunakan untuk kepentingan pemeliharaan hewan peliharaan masyarakat. Sumber air tersebut tidak jauh dari salah satu pesisir pantai yang ada di Desa Tuafanu sehingga pantai yang ada di desa tersebut diberi nama oleh masyarakat dengan sebutan Pantai Oetune yang banyak dikenal sampai sekarang.

Pada tahun 1995 Pantai Oetune pertama kali dikelola oleh masyarakat Desa Tuafanu dengan dibawah pimpinan Kepala Desa Tuafanu Bapak Eduard Nabunome yang menjabat kepala desa. Pada waktu itu kepala desa dan tim membangun sebuah lopo besar yang terdiri dari 4 tiang masing-masing tiang didirikan oleh setiap tokoh masyarakat dari 4 dusun di Desa Tuafanu yaitu Dusun Kati, Tuafanu, Haumeto dan Poni. Biaya pengelolaan pada saat itu masih berbentuk swadaya masyarakat. Setelah itu pada tahun 2002 masyarakat kembali melakukan bakti sosial untuk mendirikan lopo kecil dengan atap alang-alang sebanyak 6 unit dan toilet 1 unit.

Pada tahun 2011 pantai Oetune mulai dikelola oleh pemerintah Dinas pariwisata Timor Tengah Selatan dan mulai diterapkan penggunaan karcis masuk. Walaupun demikian perhatian pemerintah belum optimal terlihat pada penyediaan sarana prasarana masih sangat kurang. Sehingga pada tahun 2018 pemerintah dinas pariwisata memulai pengelolaan dengan membangun lopo permanen sebanyak 14 unit dengan desain rumah adat Suku Timor dan toilet-toilet kecil. Setelah itu Pantai Oetune terus mendapat perhatian dari pemerintah Dinas Pariwisata sehingga pada tahun 2019 mulai dibangun lopo di sekitar pesisir pantai, rumah pasar,

MCK, *gallery souvenir*, villa sebanyak 2 unit dan tempat ibadah. Adapun fasilitas ini pemanfaatannya belum optimal karena fasilitas listrik dan air bersih yang belum tersedia.

Secara geografis, Pantai Oetune adalah pantai yang berada di Desa Tuafanu, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Secara geografis Pantai Oetune terletak pada titik koordinat 10.0204° Lintang Selatan dan 124.5385° Bujur Timur. Topografi didominasi oleh dataran aluvial datar sampai berkemiringan landai. Desa Tuafanu memiliki ketinggian 13 m dari permukaan laut.

Sedangkan tekstur tanahnya berupa tanah berpasir. Berdasarkan hidrologi, maka sumber air berasal dari air hujan, air tanah dan air permukaan. Suhu di lokasi berkisar antara 27oC - 29oC. Kelembaban udara 85,5% per tahun, dan kecepatan angin rata-rata 12 – 20 knots. Letak Dan Luas Wilayah Desa Tuafanu secara administrasi batas wilayah desa Tuafanu terdiri atas bagian utara bersebelahan dengan Desa Nunusunu, bagian selatan berbatasan langsung dengan Desa Tuaneke, bagian barat berbatasan dengan Desa Kiufatu, bagian timur berbatasan dengan Desa Kualin.



Gambar 1. Peta Desa Tuafanu, dengan luas wilayah Desa Tuafanu 3.600 Hektar
Sumber: Dokumentasi Penulis 2020

Secara aksesibilitas, daya tarik wisata sudah memadai dan dapat ditempuh dengan kendaraan umum dengan perjalanan sepanjang 115 km atau 2-5 jam perjalanan dari pusat kota Kupang. Namun yang perlu menjadi perhatian, sekitar kurang lebih 300 meter sebelum masuk kawasan pantai, akses jalan masih berupa pengerasan dan sempit. Jalan ini licin dan becek pada saat musim hujan sehingga mengurangi kenyamanan.

Pantai Oetune memiliki keunikan yaitu pesisir dengan hamparan padang pasir lembut yang berwarna coklat sekitar 100 meter dari perairan. Atraksi unik yang ada di Pantai Oetune adalah pasir coklat keemasan seperti yang terdapat di padang gurun, tumbuh pula cemara laut, pohon lontar dan pohon kasuari yang berjejer sepanjang pantai dan

diperkirakan telah berumur puluhan tahun. Pantai Oetune juga sangat terjaga kebersihannya dan dengan air berwarna hijau kebiruan, pemandangan pantainya yang indah sangat cocok untuk menikmati matahari terbit dan matahari terbenam. Pantai Oetune memiliki vegetasi laut dalam kawasan pantai dan vegetasi alam berupa pegunungan dan hutan. Pantai ini berbatasan langsung dengan perairan Australia.

Jenis aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh pengunjung, selain berfoto pengunjung juga bisa melakukan aktivitas *sandboarding* atau aktivitas seluncur diatas pasir yang dapat dilakukan disepanjang pesisir pantai, namun pengunjung dapat membawa papan seluncur sendiri karena di Pantai Oetune belum tersedia.



Gambar 2. Objek Wisata Pantai Oetune

Gambaran Karakteristik Penduduk Desa Tuafanu

Jumlah penduduk Desa Tuafanu menurut data tahun 2019 tercatat 3.397 jiwa dengan rincian penduduk pria sebanyak 1.668 jiwa dan wanita sebanyak 1.709 jiwa. Rincian jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel3. Proporsi Penduduk Desa Tuafanu Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk berdasarkan jenis kelamin	Jumlah
1	Penduduk pria	1.688
2	Penduduk wanita	1.709
	Jumlah	3.397

Sumber : Desa Tuafanu

Beragam mata pencaharian penduduk Desa Tuafanu dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari yaitu dengan bekerja sebagai petani, PNS dan peternak. Mata pencaharian dalam hal ini pekerjaan tetap yang dilakukan terus menerus dalam waktu tertentu. Dari 1.008 jiwa yang dilaporkan sudah memiliki pekerjaan, tersisa sekitar dua ribu jiwa penduduk yang tidak bekerja. Hal ini dipengaruhi faktor usia tidak produktif,

maupun yang memang sedang tidak bekerja dan menanti pekerjaan. Pengelolaan pariwisata dapat masuk melalui analisis kependudukan berdasarkan mata pencaharian seperti ini untuk membuat program pengadaan kerja di sektor pariwisata agar tepat sasaran. Secara terperinci dan lebih jelas mengenai keadaan penduduk dalam bentuk mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel4. Proporsi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	788
2	PNS	20
3	Peternak	200
	Total	1.008

Sumber : Desa Tuafanu

Penduduk Desa Tuafanu mayoritas berada pada usia produktif, penduduk yang berumur 11-50 tahun sangat mendominasi total jumlah penduduk yang ada. Hal ini merupakan kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kepariwisataan untuk mengelola Pantai Oetune tidak hanya dari pemerintah namun juga masyarakat setempat melalui komunikasi yang tepat. Berikut adalah data penduduk Desa Tuafanu berdasarkan usia.

Tabel 5. Penduduk Desa Tuafanu Oetune Berdasarkan Usia

No	Usia dalam tahun	Pria	Wanita
1	0-5	167	178
2	6-10	192	174
3	11-20	437	444
4	21-30	226	215
5	31-40	215	235
6	41-50	179	197
7	51-60	152	147
8	61-70	89	92
9	71-75	33	25
	TOTAL	1.690	1.707

Pendidikan merupakan aspek mendasar dan fundamental dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat memiliki pengetahuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan membangun kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Tuafanu memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda yang diukur dari tingkat pendidikan terakhir. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, pendidikan bukan merupakan prioritas masyarakat. Terdata hanya sekitar sebagian kecil saja mendapatkan pendidikan dari total jumlah penduduk Desa Tuafanu. Data ini adalah yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Berikut adalah data dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 6. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat	Lulusan
1	TK	20
2	SD	50
3	SMP	45
4	SMA	30
5	D3	-
6	S1	10
7	S2	-
8	S3	-
TOTAL		155

Sumber : Desa Tuafanu

Gambaran Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Oetune Berdasarkan Komponen 4A

Pengelolaan daya tarik wisata alam pantai yang dilakukan oleh Pemerintah Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan dipaparkan dengan menyesuaikan susunan dari teori Menurut Cooper (dalam Suwena, 2017) dimana terdapat 4 komponen daya tarik wisata yaitu:

Atraksi (*Attractions*)

Atraksi atau daya tarik wisata merupakan keunggulan serta keunikan yang menjadi faktor penarik wisatawan berkunjung. Elemen atraksi membuat kegiatan wisata dapat berjalan merupakan komponen kunci yang menyebabkan wisatawan datang berkunjung. Atraksi wisata yang terdapat di pantai oetune adalah pesisir pantai alami dan bersih serta terdapat hamparan pasir yang menyerupai pasir padang gurun. Pantai Oetune sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di

Kabupaten TTS. Keunggulan daya tarik wisata alam pantai, dan yang menjadi daya tarik wisata di pantai oetune itu sendiri adalah padang dan keindahan pesisir pasir. Pantai ini merupakan salah satu destinasi favorit khususnya di pulau Timor. Jadi selain daya tarik wisata pantai, gurun pasir, pantai oetune juga mempunyai vegetasi alamiahnya yaitu pohon lontar, pohon kasuari dan cemara laut sehingga menjadikan salah satu destinasi menarik yang banyak dikunjungi wisatawan dan hampir setiap hari libur atau akhir pekan sangat ramai dikunjungi para wisatawan.

Aksesibilitas (*Accessibilities*)

Aksesibilitas merupakan semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari tempat asalnya ke daerah tujuan wisata. Jarak yang ditempuh saat berkunjung ke pantai Oetune dari pusat kota provinsi (Kupang) sekitar ± 115 km atau 2- 5 jam perjalanan ke daya tarik wisata Pantai Oetune mobil dan motor. Akan tetapi, sekitar +300 m sebelum masuk kawasan daya tarik wisata jalan masih berupa pengerasan dan sempit. Jalan ini licin dan becek pada saat musim hujan.

Fasilitas Pendukung (*Amenities*)

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Secara umum sarana dan prasarana yang ada di daya tarik wisata Pantai Oetune sudah cukup memadai. Penyediaan amenities di lokasi daya tarik wisata telah dioptimalkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Disana pemerintah sudah membangun beberapa fasilitas umum seperti MCK, tiket masuk, lopo untuk pengunjung berteduh ada 9 buah dan lopo induk 1, *gallery* cendramata, 1 buah menara dan fasilitas umum seperti kios-kios kecil.

Pelayanan Tambahan (*Ancillary Services*)

Pelayanan tambahan mencakup keberadaan dari berbagai organisasi yang memfasilitasi dan mendorong pengembangan serta pemasaran dari suatu destinasi wisata. Pengelolaan daya tarik wisata Pantai Oetune dikelola oleh satu pihak yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pantai Oetune juga memiliki

kelompok BUMDES yang tidak hanya terlibat langsung dalam industri pariwisata tetapi juga secara tidak langsung ikut dalam pengelolaan daya tarik wisata Pantai Oetune. Karena kelompok BUMDES Tuafanu dibentuk oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Oetune

Berdasarkan hasil penelitian di Pantai Oetune dengan melakukan wawancara terhadap 11 orang informan yang terdiri dari: Kepala Bidang Destinasi Pariwisata di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kepala Desa Tuafanu, Ketua Pengelola Objek Wisata Pantai Oetune, Tokoh Masyarakat, 4 orang pengunjung dan 4 orang masyarakat atau pedagang, mengenai peran pemerintah dalam pengelolaan daya tarik wisata Pantai Oetune diuraikan dalam paragraf berikut:

Peran Koordinator Sebagai Perencana dan Pelaksana Manajerial

Peran pemerintah sebagai coordinator terkait dengan penetapan kebijakan dan strategi yang diterapkan untuk pembangunan daerah pariwisata. Kebijakan ini wajib merangkul seluruh elemen masyarakat sebagai salah satu actor utama dalam pengembangan pariwisata. Peran pemerintah pada level coordinator bekerja sebagai asosiasi yang menyelenggarakan kegiatan pariwisata baik pada level lokal, regional maupun internasional. Pemerintah menangani perencanaan dan fungsi manajerial sebagai system koordinasi antara seluruh sektor yang saling terkait dalam industri jasa dan layanan pariwisata.

Perencanaan khusus untuk tahun 2021, dinas pariwisata bidang destinasi pariwisata sudah melakukan perencanaan untuk pengelolaan Pantai Oetune dengan harapan ada dukungan dana DAU/DAK yang cukup untuk membangun fasilitas. Target utama fasilitas yang akan dibangun adalah pengadaan listrik, ketersediaan air bersih, tempat sampah dan penguatan jaringan telekomunikasi. Selain itu, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur yakni memperbaiki akses masuk menuju daya tarik wisata karena kondisi jalan yang belum memadai. Selain itu pemerintah

akan berencana membangun sarana hiburan berupa kolam renang di area yang masih kosong. Perbaikan juga akan dilakukan pada dua pintu gerbang utama sebagai pintu masuk Pantai Oetune. Terkait dengan hal ini, pihak desa menyatakan bahwa pemerintah belum mengadakan komunikasi kerjasama antara dan sepenuhnya pembangunan masih dikelola oleh pemerintah daerah setempat.

Ada beberapa strategi/kebijakan yang sudah direncanakan yaitu, Pertama pengembangan infrastruktur yaitu jalan masuk ke objek wisata yang belum memadai sekitar 300 meter. kedua, peningkatan sarana dan prasarana yang terdapat di objek wisata pantai oetune dalam hal ini pemerintah lebih focus untuk penyediaan air bersih dan fasilitas listrik dan ketiga pemerintah ingin membangun sarana hiburan, kolam renang, area parkir di lokasi objek wisata dan pembuatan jalan masuk/gerbangnya dibuat 2 yaitu yang pintu masuk ke 2 dilokasi padang pasir.

Peran Fasilitator Pemerintah Sebagai Pendamping dan Pemberi Bantuan Fasilitas Pemerintah sebagai fasilitator berupaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata. Sebagai fasilitator pemerintah menjalankan fungsi pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal.

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan objek wisata Pantai Oetune yaitu penyediaan sarana dan prasarana di lokasi daya tarik wisata untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Beberapa fasilitas sudah dibangun berupa MCK, tiket masuk, lopo untuk pengunjung berteduh sejumlah 14 unit dan lopo induk 1 unit, *gallery* cendramata, 1 unit menara pantau dan fasilitas umum untuk masyarakat bisa berjualan seperti kios-kios kecil. Selain itu pemerintah daerah melakukan promosi untuk setiap destinasi yang ada di kabupaten TTS melalui internet dengan memanfaatkan website dinas pariwisata, *facebook* dan Instagram. Selain itu pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di setiap desa dan kelurahan yang memiliki potensi

pariwisata yang perlu didampingi untuk dikembangkan agar mendapatkan bantuan dana pengelolaan dari pemerintah daerah.

Terdapat beberapa peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengelolaan daya tarik wisata pantai Oetune yakni menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana prasarana daya tarik wisata sebagai berikut: 1 buah kamar bilas, 8 buah toilet, 22 buah lopo kecil, 1 buah lopo besar, 1 buah menara pantau sebagai spot foto, tempat ibadah, *gallery souvenir*, rumah pasar (4 kamar) dan akses jalan masuk kedalam daya tarik wisata. Pemerintah Dinas Pariwisata juga melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan atau desa yang memiliki potensi wisata dan untuk pemberdayaan masyarakat terkait dalam membuka usaha di objek wisata masyarakat tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah dan itu dibangun sendiri oleh masyarakat. Selain itu pemerintah dinas pariwisata juga melakukan promosi untuk setiap destinasi yang ada di kabupaten TTS melalui website, facebook, dan instagram.

Peran Stimulator Pemerintah Sebagai Pembina Dalam Pengelolaan Pantai

Peran stimulator merupakan upaya pemerintah agar menciptakan strategi yang tepat untuk membangun daya tarik wisata. Pemerintah menyusun strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka pengembangan daya tarik wisata. Pemerintah juga melakukan pembinaan kepada masyarakat yang diberdayakan di daya tarik wisata, masyarakat di ajak bagaimana menjaga dan mengelola objek wisata agar tetap lestari dan menarik hati para pengunjung.

Daya tarik wisata Pantai Oetune sepenuhnya dikelola oleh PEMDA TTS tetapi dalam aktivitas sehari-hari terdapat kelompok sadar wisata yang selalu dibina oleh Dinas Pariwisata setiap tahun dengan program khusus dirancang untuk bertugas membantu pengelolaan Pantai Oetune. Sedangkan untuk keterlibatan masyarakat, pemerintah sangat terbuka, bisa dibuktikan dengan masyarakat yang bekerja di daya tarik wisata yang 100% adalah masyarakat asli Desa Tuafanu (sebagai pengelola seperti penjaga tiket masuk, keamanan, dan penjaga kebersihan). Selain

itu, masyarakat lokal juga terlibat sebagai penyedia jasa usaha di daya tarik wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pemerintah juga melakukan sosialisasi tentang sadar wisata kepada masyarakat di setiap desa yang memiliki potensi wisata. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pariwisata. Daya tarik wisata pantai oetune juga sudah menyediakan rumah pasar 1 unit dengan 4 kamar untuk masyarakat yang berjualan. Walaupun untuk saat ini belum dapat beroperasi karena fasilitas listrik baru diadakan pada tahun 2021. Selama ini dinas pariwisata mendapatkan dana pengelola dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kementerian Keuangan khusus bidang pariwisata, sedangkan untuk pihak lain seperti pihak swasta belum ada kerja sama. Namun, kedepan pemerintah siap untuk bisa bekerja sama dengan pihak swasta.

Peran Motivator Pemerintah sebagai Pemicu Semangat Masyarakat Setempat

Peran motivator oleh pemerintah dilaksanakan pada tataran praktis untuk mengupayakan agar geliat usahajasa pariwisata terus berjalan. Masyarakat perlu diberikan motivasi agar pengembangan dan pengelolaan pariwisata dapat berjalan dengan konsisten.

Saat ini peran dari pemerintah dalam rangka memberikan motivasi masyarakat bukan berupa bantuan pendanaan untuk masyarakat. Peran motivasi dijalankan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk berwirausaha di Pantai Oetune menyediakan jasa pariwisata sebagai penunjang bagi wisatawan. Dukungan ini dilakukan dengan tidak memungut biaya sepeser pun bagi masyarakat yang ingin berwirausaha di sekitar pantai. Selain itu, dukungan pemerintah pada pengelolaan pariwisata adalah dengan melakukan dorongan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan melalui pelatihan-pelatihan dan dibentuknya kelompok sadar wisata yang memastikan pengelolaan Pantai Oetune dapat terlaksana dengan baik.

Peran motivator dijalankan dengan beberapa hal yaitu penyediaan lahan untuk membuka usaha tanpa memungut biaya dari hasil penjualan masyarakat, dan pemerintah juga menyediakan fasilitas rumah pasar untuk mereka membuka usaha.

Tabel 7. Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Oetune

No	Peran pemerintah Menurut Blakely, dalam M. Kuncoro (2004)	Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai Oetune Kabupaten Timor Tengah Selatan
1	Koordinator	Melakukan koordinasi pada berbagai pihak terkait pengembangan infrastruktur (jalan masuk). Berfokus pada penyediaan air bersih dan listrik. Serta mengkoordinasikan pengadaan sarana hiburan, kolam renang, area parkir di lokasi objek wisata dan pembuatan 2 pintu masuk.
2	Fasilitator	Memfasilitasi dengan pengadaan fasilitas dan sarana prasarana daya tarik wisata sebagai berikut: 1 buah kamar bilas, 8 buah toilet, 22 buah lopo kecil, 1 buah lopo besar, 1 buah menara pantau sebagai spot foto, tempat ibadah, <i>gallery souvenir</i> , rumah pasar (dengan 4 kamar) dan akses jalan masuk kedalam daya tarik wisata. Pemerintah Dinas Pariwisata juga melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan atau desa yang memiliki potensi wisata. Melakukan promosi melalui media sosial.
3	Stimulator	Menciptakan stimulasi program yang khusus dirancang untuk pengelolaan Pantai Oetune. Mendukung keterlibatan masyarakat dengan merekrut masyarakat asli Desa Tuafanu (sebagai pengelola seperti penjaga tiket masuk, keamanan, dan penjaga kebersihan). Selain itu, masyarakat lokal juga terlibat sebagai penyedia jasa usaha di daya tarik wisata untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.
4	Motivator	Peran dari pemerintah dalam rangka memberikan motivasi masyarakat bukan berupa bantuan pendanaan untuk masyarakat. Peran motivasi dijalankan dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk berwirausaha di Pantai Oetune menyediakan jasa pariwisata sebagai penunjang bagi wisatawan. Dukungan ini dilakukan dengan tidak memungut biaya sepeser pun bagi masyarakat yang ingin berwirausaha di sekitar pantai. Selain itu, dukungan pemerintah pada pengelolaan pariwisata adalah dengan melakukan dorongan kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kebersihan melalui pelatihan-pelatihan dan dibentuknya kelompok sadar wisata yang memastikan pengelolaan Pantai Oetune dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan pembahasan mengenai empat peran pemerintah daerah dalam pengelolaan daya tarik wisata alam maka kesimpulan yang dapat diambil adalah pemerintah daerah TTS telah melakukan keempat peran sesuai dengan teori Blakely dalam M. Kuncoro, 2004. Upaya-upaya ini terdiri dari: (1) peran koordinator, dilakukan dengan merencanakan strategi pengelolaan di Pantai Oetune yang dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar daya tarik wisata melalui perencanaan pembangunan infrastruktur jalan masuk ke objek wisata dan penyediaan

fasilitas listrik dan air bersih agar kedepannya lebih baik lagi. (2) peran fasilitator dilaksanakan dengan memfasilitasi sarana prasarana dan melakukan promosi untuk setiap destinasi wisata melalui website dan media sosial. (3) peran stimulator dilaksanakan melalui program-program kepariwisataan seperti kelompok sadar wisata dan program perekrutan masyarakat setempat. (4) peran motivator yakni melalui dukungan bagi masyarakat untuk berwirausaha dalam sektor usaha jasa pariwisata tanpa memungut biaya apapun. Upaya tersebut berjalan sampai dengan saat ini dan menunjukkan hasil

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata alam Pantai Oetune.

Adapun terdapat beberapa rekomendasi dalam penelitian ini untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pengelolaan daya tarik wisata yakni; (1) secara konsisten memperhatikan setiap destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan dalam hal ini memberikan bantuan dana sebagai stimulasi yang nantinya pada jangka panjang akan mengundang pihak investor, swasta dan perusahaan-perusahaan bidang industri pelayanan pariwisata untuk menanamkan modal demi kemajuan sector pariwisata di Kabupaten timor Tengah Selatan. (2) membangun jaringan kerjasamadengan desa yaitu desa Tuafanu, serta kerja sama dengan pihak untuk meningkatkan kualitas kerjasama antara pemerintah dan masyarakat desa. Peningkatan partisipasi masyarakat dilakukan dengan melakukan stimulus memperbanyak mata pelatihan agar masyarakat semakin aktif dalam pembangunan pariwisata di Pantai Oetune

REFERENSI

- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Rangka Mengembangkan Potensi Pariwisata Di Jawa Timur Serta Meningkatkan Perekonomian Domestik. *Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis)*, 3(1).
- Blakely, E. J. (1994). *Planning Local Economic Development (Theory and Practice)*. California: Sage Publications, Inc. 480 p.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Marius, Jelamu. (2017). Buku Database Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Dinas Pariwisata NTT. Kupang.
- Marpaung, Happy. (2002). *Pengetahuan Kepariwisata*. Alfabeta. Bandung
- Moleong Lexy J. (2004), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Y. E. (2020). Analisis Potensi dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Desa Tulakadi Kawasan Perbatasan Indonesia. *Media Wisata*, 18 (2), 195-209.
- Putra, I. N. D., & Hitchcock, M. (2006). The Bali bombs and the tourism development cycle. *Progress in Development Studies*, 6(2), 157-166.
- Sunarjaya, I. G., Par, S., Par, M., Nugraha, Y. E., Kesos, S., & Par, M. (2019, March). Analisis Persepsi Employee Empowerment Terhadap Employee Turnover Intention Di Dewi Sinta Hotel. In *Journey (Journal of Tourismpreneurship, Culinary, Hospitality, Convention and Event Management)* (Vol. 1, No. 1, pp. 182-206).
- Utami, R. C., & Hartono, D. (2016). Analisis Daya Saing Harga Pariwisata Indonesia: Pendekatan Elastisitas Permintaan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 11, 93-118
- Widaningrum, A., & Damanik, J. (2018, March). Stakeholder Governance Network In Tourist Destination: Case Of Komodo National Park And Labuan Bajo City, Indonesia. In *2018 Annual Conference of Asian Association for Public Administration: "Reinventing Public Administration in a Globalized World: A Non-Western Perspective"(AAPA 2018)*. Atlantis Press.
- Subadra, I Nengah.(2007). Peran Pemerintah dalam Pembangunan Pariwisata. Retrieved from :

<http://subadra.wordpress.com/2007/08/26/89/>

PROFIL PENULIS

Yudha Eka Nugraha, merupakan dosen tetap di Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia dengan bidang kepakaran pariwisata. Email

yudhaekanugraha@gmail.com

Id Scholar

<https://scholar.google.com/citations?user=1ZIdBhwAAAAJ&hl=id>

Elisabet Rambu Lika Enga, merupakan lulusan Prodi Usaha Perjalanan Wisata di Politeknik Negeri Kupang, Kupang, Indonesia bercita-cita memajukan kepariwisataan NTT.